



# Dari Oedin ke Ridho

Kado 100 Hari Pemerintahan  
M. Ridho Ficardo-Bachtiar Basri

**Editor:**  
Udo Z. Karzi

Arizka Warganegara, Asrian Hendi Caya, Bambang Eka Wijaya, Budisantoso Budiman, Budi Kurniawan, Daeng Novrial, Dharma Setyawan, Djadjat Sudradjat, Fathoni, Fritz Akhmad Nuzir, F.X. Sumardja, Hadi Aspirin, Hardi Hamzah, Hertanto, HS Tisnanta, Husni Anshari, Herpratiwi, I.B. Ilham Malik, Imam Mustofa, Iswadi Pratama, Iwan Nurdaya-Djafar, Juniardi, Khamida Khairani, Lukman Hakim, Mastuhi, M. Akib, Oki Hajiansyah Wahab, Rudi Natamihardja, Rudy, Sudjarwo, Sunardi, Syaiful Irba Tanpaka, Syarief Makhya, Udo Z. Karzi, Yoke Muelgini

# Dari Oedin ke Ridho

Kado 100 Hari Pemerintahan  
M. Ridho Ficardo-Bachtiar Basri

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002  
tentang Hak Cipta**

**Lingkup Hak Cipta**

**Pasal 2:**

1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Ketentuan Pidana:**

**Pasal 72**

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud -dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# Dari Oedin ke Ridho

Kado 100 Hari Pemerintahan  
M. Ridho Ficardo-Bachtiar Basri

Arizka Warganegara , Asrian Hendi Caya, Bambang Eka Wijaya,  
Budisantoso Budiman, Budi Kurniawan, Daeng Novrial,  
Dharma Setyawan, Djadjat Sudradjat, Fathoni, Fritz Akhmad Nuzir,  
F.X. Sumardja, Hadi Aspirin, Hardi Hamzah, Hertanto, HS Tisnanta,  
Husni Anshari, Herpratiwi, I.B. Ilham Malik, Imam Mustofa,  
Iswadi Pratama, Iwan Nurdaya-Djafar, Juniardi, Khamida Khairani,  
Lukman Hakim, Mastuhi, M. Akib, Oki Hajiansyah Wahab,  
Rudi Natamihardja, Rudy, Sudjarwo, Sunardi,  
Syaiful Irba Tanpaka, Syarief Makhya, Udo Z. Karzi, Yoke Muelgini

**Editor:**

Udo Z. Karzi



**Dari Oedin Ke Ridho :**

**Kado 100 Hari Pemerintahan M. Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri**

**Penulis:** Arizka Warganegara, Asrian Hendi Caya,  
Bambang Eka Wijaya, Budisantoso Budiman,  
Budi Kurniawan, Daeng Novrial, Dharma  
Setyawan, Djadjat Sudradjat, Fathoni, Fritz  
Akhmad Nuzir, F.X. Sumardja, Hadi Aspirin,  
Hardi Hamzah, Hertanto, HS Tisnanta,  
Husni Anshari, Herpratiwi, I.B. Ilham  
Malik, Imam Mustofa, Iswadi Pratama,  
Iwan Nurdaya-Djafar, Juniardi, Khamida  
Khairani, Lukman Hakim, Mastuhi, M. Akib,  
Oki Hajiansyah Wahab, Rudi Natamihardja,  
Rudy, Sudjarwo, Sunardi, Syaiful Irba  
Tanpaka, Syarief Makhya, Udo Z. Karzi,  
Yoke Muelgini

**Editor:** Udo Z. Karzi

**Sampul dan Tata Letak:** Tri Purna Jaya

Cetakan Pertama, September 2014

14 x 21 cm

170 hlm + xii

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang.

*All rights reserved*

ISBN : 978-602-1534-38-0

**Penerbit:**

Indepth Publishing

Jl. Ahmad Yani Gang Pioner no 41, Bandar Lampung

indepth.publishing@gmail.com | [www.indepthpublishing.net](http://www.indepthpublishing.net)

+6281279604790

*Bekerjasama dengan :*

Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hak Asasi Manusia (PKKPHAM)  
Fakultas Hukum Universitas Lampung

## *100 dan Muda*

**B**UKU Dari Oedin Ke Ridho: Kado 100 Hari Pemerintahan M.Ridho Ficardo-Bachtiar Basri yang ada di hadapan pembaca ini amatlah istimewa bagi kami, Indepth Publishing. Selain momentum 100 hari pemerintahan baru, buku ini juga kebetulan adalah buku ke-100 yang kami terbitkan. Sebagai penerbit lokal Lampung yang hanya bermodalkan semangat di awal pendiriannya, menerbitkan 100 judul buku dalam kurun waktu dua tahun tentu tidak pernah kami bayangkan sebelumnya.

Niat untuk mengembangkan budaya literasi dan membangun komunitas epitemik ternyata mendapatkan sambutan publik Lampung. Memang tidak mudah mencari kegairahan dalam ranah tulis menulis. Namun, beberapa tahun terakhir ini percikan-percikan itu mulai bermunculan dari pelbagai penjuru Sai Bumi Ruwa Jurai. Banyak diantaranya merupakan penulis muda dengan goresan tinta yang membara.

Gairah dan semangat muda inilah yang mengantarkan kami untuk terus melakukan inovasi dan hal-hal kreatif. Kami senantiasa meyakini bahwa Lampung sesungguhnya memiliki 'tukang-tukang tulis' yang belum terendus. Pun potensi itu sudah mulai terlihat.

Buku yang ada di hadapan pembaca ini ditulis oleh berbagai kalangan mulai dari akademisi, budayawan, peneliti

bahkan aktivis ini seluruhnya berasal dari artikel-artikel yang pernah diterbitkan oleh Rubrik Opini SKH Lampung Post. Ide untuk membukukan berbagai pemikiran terkait pemerintahan Lampung menjadi misi penerbitan buku ini.

Embrio buku ini menetes dari kegelisahan yang terdedah dalam diskusi intensif antara Udo Z. Karzi, Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hak Asasi Manusia (PKKPHAM) Fakultas Hukum Universitas Lampung (FH Unila) dan Indepth Publishing. Kolaborasi gagasan inilah yang pada gilirannya melahirkan buku ini dihadapan pembaca. Kami berharap kedepan akan terus lahir karya-karya yang harapannya bermanfaat bagi publik.

Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih terhadap PKKPHAM FH Unila yang telah berkenan mendukung penerbitan buku ini. Penghargaan juga kami sampaikan kepada para penulis yang telah meluangkan waktu untuk menyumbangkan pemikirannya. Tak lupa kepada editor buku ini, Udo Z. Karzi yang sejak awal telah mencetuskan ide dan juga berdedikasi untuk mengumpulkan tulisan.

**September 2014**

Indepth Publishing

# Sekadar Catatan Editor



enerbit buku ini bilang mesti dikasih pengantar. Biar tak “*curigation*”, katanya. Maka, terpaksa ditulis semacam catatan alakadarnya ini.

*Project* ini sebenarnya sederhana saja. Ia lahir dari cetusan spontanitas dalam sebuah obrolan ringan sembari *ngupi* di kantor Indepth Publishing. Tidak terlalu serius, tetapi ternyata mendapat sambutan yang antusias dari Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hak Asasi Manusia (PKPPKHAM) Fakultas Hukum Unila.

Syukurlah. Barangkali kali saja ada faedahnya buat kemaslahatan masyarakat Lampung.

Ya, Lampung yang antik dan unik. Di negerilah berbagai kisah dengan berbagai genre dan tema lahir dengan segala daya pikatnya. Satu di antaranya sebut saja cerita tentang pemilihan gubernur Lampung yang luar biasa melelahkan, menguras energi, dan terasa bertele-tele; meskipun akhirnya berbahagia.

Dan sejatinya, orang Lampung senantiasa bahagia. Sebab, dengan sumber daya yang ada dan posisi strategis Lampung sebagai gerbang Sumatera, Bumi Ruwa Jurai diyakini berpotensi besar menjadi daerah maju dan berkembang pesat.

Kita bergembira pula, karena memiliki gubernur termuda se-Indonesia –bahkan kabarnya gubernur termuda di Asia– Muhammad Ridho Ficardo yang didukung juga oleh wakilnya



yang cukup berpengalaman dalam pemerintahan, Bachtiar Basri.

Setelah dilantik pada 2 Juni 2014 lalu, kedua pasangan Gubernur ini segera bergerak cepat, di antaranya dengan mencanangkan Program 100 Hari Pemerintahan Ridho-Bachtiar. Berdasarkan perhitungan sejak dilantik, usia pemerintahan Ridho-Bachtiar genap 100 hari pada 10 September 2014.

Dengan mengambil momentum 100 Hari Pemerintahan M. Ridho Ficardo-Bachtiar Basri, kami berupaya menghimpun pemikiran-pemikiran terserak dalam Opini *Lampung Post* sebagai bagian dari upaya memberikan saran, masukan, kritik bagi pemerintah provinsi Lampung ke depan.

Tema artikel yang akan dipilih berisi refleksi atas pemerintahan provinsi Lampung dan gagasan/pandangan apa yang prospektif dan antisipatif dalam kerangka pembangunan Lampung ke depan; tentu dengan perspektif penulis masing-masing.

Waw, ternyata banyak sekali artikel *Lampung Post* yang memenuhi tema yang disodorkan itu yang termuat dalam rentang 1 Januari 2014 hingga 5 September 2014. Masalahnya, buku ini tidak boleh terlalu tebal dengan mempertimbangkan anggaran dan kemampuan daya beli pembaca. Kalau mahal-mahal bukunya susah dipasarkan. Hehee... Padahal, kami berharap buku ini dibaca oleh sesiapa pun yang peduli dengan Lampung.

Akhirnya, dengan berbagai pertimbangan –dengan segala maaf, boleh jadi sangat subyektif– dipilihlah 33 artikel dari 33 penulis ditambah dengan satu tulisan dari Djadjat Sudradjat, anggota Dewan Redaksi Media Group yang dijadikan epilog buku ini.

Secara tematis, buku ini sangat beragam: politik, hukum, ekonomi, sosial, seni-budaya, pendidikan, dan lingkungan

hidup. Meskipun demikian, buku ini sengaja disusun secara kronologis pemuatannya di *Lampung Post*; untuk memudahkan penelusuran perkembangan pemikiran penulis di Lampung.

Dari segi waktu, tulisan-tulisan dalam buku ini ditulis dalam tiga waktu di tahun 2014. Pertama, sebelum pemilihan Gubernur Lampung, 9 April 2014, yang banyak berisi harapan tentang kepemimpinan Lampung. Kedua, setelah 9 April 2014 sampai pelantikan Gubernur Lampung terpilih M. Ridho Ficardo-Bachtiar Basri, 2 Juni 2014. Ketiga, periode 100 hari kepemimpinan Gubernur Lampung Ridho-Bachtiar setelah dilantik. Periode kedua dan ketiga harapan itu sudah jelas mengarah kepada sosok Ridho Ficardo yang muda-ganteng-cerdas bersama sang wakil yang kaya pengalaman, Bachtiar Basri.

Judul buku ini, *Dari Oedin ke Ridho*, diambil dari opini Syarif Makhya berjudul sama yang memang ditulis untuk pelantikan Ridho-Bachtiar sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung pada 2 Juni 2014.

Secara kebetulan, bab awal buku ini dibuka dengan tulisan Iswadi Pratama ditahun baru 2014. Kalau Descarte bilang, "*Cogito ergo sum*, saya berpikir maka saya ada"; Iswadi menulis *Saya berkarya maka saya ada*. Sangat eksistensialis! Dan, begitulah seharusnya seluruh lapisan masyarakat jika ingin memajukan Lampung harus berorientasi pada masa depan dengan karya (sembari mengingat "mentalitas manusia pembangunan"-nya Koetjaraningrat) .

Tanpa harus membahas satu per satu tulisan, gagasan-gagasan yang dielaborasi para penulis dalam buku ini semua menarik, ada sastrawan-seniman-budayawan, ada akademisi, ada praktisi, dan juga ada aktivis. Semua sangat konstruktif untuk menjadi bahan pertimbangan –minimal menjadi refleksi– bagi pembangunan dan kepemimpinan di Bumi Ruwa

Jurai dalam menggapai kesejahteraan bersama!

Ini sesuai dengan tulisan terakhir dari H.S. Tisnanta berjudul *Pak Gub dan si Miskin*, pada akhirnya pemerintahan (daerah) dibentuk dengan kontrak sosial seluruh masyarakat daerah tersebut untuk mewujudkan apa yang disebut dengan *welfare state* (negara kesejahteraan).

Akhirnya, selamat merayakan kegembiraan kepada pembaca.

Tabik.

Wismamas Kemiling, 5 September 2014

Udo Z. Karzi


# Daftar Isi

<b>Pengantar Penerbit: 100 dan Muda</b>	v
<b>Sekadar Catatan Editor</b>	vii
<b>Daftar Isi</b>	xi
<b>Prolog: Kharisma pada Pemimpin Modern!</b>	1
<b>Bambang Eka Wijaya</b>	
1. Saya Berkarya maka Saya Ada	4
<b>Iswadi Pratama</b>	
2. Gubernur yang Dirindui	12
<b>Mastuhi</b>	
3. Tahap Baru Pembangunan Lampung	17
<b>Asrian Hendi Caya</b>	
4. Berharap pada Gubernur Baru	21
<b>Sunardi</b>	
5. Menata Birokrasi di Lampung	26
<b>Arizka Warganegara</b>	
6. Membumikan Budaya Lampung	31
<b>Khamida Khairani</b>	
7. Harapan Rakyat Lampung	37
<b>Daeng Novrial</b>	
8. Lampung Trendsetter Pemilu Baru	41
<b>Lukman Hakim</b>	
9. Lampung Butuh Pemimpin Responsif	44
<b>Husni Anshari</b>	
10. Mau Dibawa ke Mana Pendidikan Kita	49
<b>Herpratiwi</b>	
11. Era Pemimpin Muda 53	
<b>Imam Mustofa</b>	
12. Mau Dibawa ke Mana (Hubungan) Kita	57
<b>Yoke Muelgini</b>	
13. Gubernur dan Paradigma Baru Pembangunan Hukum di Lampung	62
<b>Rudy</b>	
14. Dari Oedin ke Ridho	68
<b>Syarief Makhya</b>	
15. Darurat Pembenahan Manajemen Pendidikan	72
<b>Hadi Aspirin</b>	

16. Mata Budaya Gubernur Ridho <b>Syaiful Irba Tanpaka</b>	75
17. Keterbukaan Informasi di Lampung <b>Juniardi</b>	78
18. Pendidikan Jangan Dilepas! <b>Sudjarwo</b>	83
19. Pemimpin Muda Pembangunan Lampung <b>Fritz Akhmad Nuzir</b>	88
20. Infrastruktur dan Disorientasi Pembangunan <b>I.B. Ilham Malik</b>	93
21. Transformasi Piil Pesanggiri <b>Iwan Nurdaya-Djafar</b>	97
22. Membangun Trust <b>Budi Kurniawan</b>	101
23. Masa Depan JSS <b>M. Akib</b>	105
24. Merdeka Posisi 69 <b>Fathoni</b>	109
25. Gubernur Baru dan Gelombang Pemilukada Pertama <b>Hertanto</b>	113
26. Ridho Tentang Muda? <b>Dharma Setyawan</b>	117
27. Masa Depan Register 45 <b>Oki Hajiansyah Wahab</b>	121
28. Kota Budaya, Kota Kreatif <b>Udo Z. Karzi</b>	125
29. Ironi Wisata Lampung <b>F.X. Sumarja</b>	129
30. Langkah Lampung Meningkatkan Kerjasama Luar Negeri <b>Rudi Natamihardja</b>	132
31. Ridho Ficardho Menuju Tingkat Nasional: Tinjauan Budaya Politik, Politik Budaya Lampung <b>Hardi Hamzah</b>	135
32. Menagih Janji Gubernur (Termuda) Lampung <b>Budisantoso Budiman</b>	141
33. Pak Gub dan si Miskin <b>H.S. Tisnanta</b>	154
<b>Epilog: Muda</b>	158
<b>Djadjat Sudradjat</b>	
Sejarah Pemuatan Tulisan	161
Para Penulis	163

# Langkah Lampung Meningkatkan Kerja Sama Luar Negeri

**Rudi Natamihardja**

asar bebas ASEAN 2015 sudah di depan mata. Pemerintah Daerah Lampung tidak dapat menunggu lagi karena waktu terus berjalan. Lampung go internasional itulah yang terbesit di pikiran penulis ketika menuliskan artikel ini. Jujur, di era kepemimpinan gubernur terdahulu nyaris tidak terdengar kerjasama luar negeri antara Pemda Lampung dengan pihak luar, baik itu dengan pemerintah maupun swasta. Kalau-pun ada kerja sama tersebut mungkin belum banyak diketahui dan mendatangkan manfaat bagi masyarakat Lampung. Padahal menjalin hubungan dengan luar negeri merupakan salah satu program yang digalakkan Pemerintah pusat sejak era otonomi daerah.

Lahirnya Undang-undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan payung hukum kepada setiap Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kerja sama luar negeri. Pasal 1 UU No.37 Tahun 1999 menyebutkan bahwa hubungan luar negeri tidak semata hubungan yang dapat dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan pihak asing, tetapi Pemda mendapat kesempatan untuk menjalin hubungan tersebut. Begitu pula dalam UU No. 32 Tahun 2004, Pemda dapat melakukan hubungan luar negeri dengan persetujuan DPRD.

Pembagian urusan antara Pusat dan Daerah telah jelas digariskan melalui UU No. 32 Tahun 2004. Terdapat enam hal yang menjadi urusan pemerintah pusat yaitu dibidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama. Untuk selebihnya setiap daerah diberikan kewenangan mengembangkannya sesuai kemampuan masing-masing dengan berpedoman juga pada peraturan pelaksanaan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/KP/XII/2006/01 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri.

Sebagai contoh, Kota Surabaya telah berhasil melakukan kerja sama *sister city* dengan Kota Marseille, Perancis. Pemerintah Kota Surabaya bahkan telah mengirimkan beberapa pegawainya ke Kota Marseille untuk belajar, magang dan melakukan observasi langsung. Lewat kerja sama dengan Kota yang lebih berpengalaman sesungguhnya kita akan lebih menghemat waktu untuk belajar.

Marseille adalah kota pelabuhan di Perancis yang berhasil mengubah diri dari stigma kota kumuh menjadi kota wisata yang menjadi destinasi wisata masyarakat Eropa selama masa liburan. Pada tahun 2013 Marseille mendapat penghargaan menjadi kota budaya se-Eropa karena keberhasilannya mengembangkan pluralisme ditengah keragaman penduduknya. Kota Marseille yang hanya memiliki luas 240 Km<sup>2</sup> juga dinilai berhasil dalam pengelolaan taman. Marseille memiliki 54 taman yang luasnya lebih dari satu hektar, bahkan 14 taman di antaranya memiliki luas lebih dari lima hektar. Semua taman tersebut terkontrol dan tertata dengan baik serta memiliki fasilitas yang lengkap.

Lampung dengan karakteristik wilayah yang mirip dengan Marseille sesungguhnya memiliki peluang untuk dapat bekerja sama. Paling tidak terdapat karakteristik identik

antara Maseille dan Lampung. Dari segi geografis keduanya merupakan kota pelabuhan yang menjadi jalur utama perdagangan. Kota Marseille luasnya hanya satu per seratus luas Lampung merupakan jalur emas penghubung antara Benua Afrika dan Perancis. Sedangkan Lampung sendiri merupakan penghubung Pulau Jawa dan Sumatra yang memiliki potensi besar dari segi ekonomi.

Hal yang selama ini kurang mendapatkan perhatian Pemerintah Provinsi Lampung adalah promosi tempat wisata di Lampung. Padahal, untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara, Lampung dapat bekerja sama dengan ratusan perwakilan Indonesia yang tersebar di penjuru dunia. Perwakilan Indonesia di luar negeri notabene bertugas untuk mempromosikan potensi berbagai daerah di Indonesia.

Melihat karakteritik Lampung dan Marseille, Lampung sesungguhnya dapat merintis kerja sama di bidang penatan kota, pengembangan transportasi dan optimalisasi pelabuhan sebagai modal perekonomian yang strategis. Lewat kerja sama luar negeri, Lampung dapat belajar banyak dari Marseille tentang pengalamannya menarik wisatawan dalam dan luar negeri untuk datang dan berlibur dengan aman dan nyaman.

Ridho Ficardo, sebagai Gubernur termuda di Indonesia harapannya juga memiliki semangat anak muda yang senantiasa melakukan berbagai terobosan. Selama ini kita hanya bermimpi menjadikan Lampung sebagai kota idaman yang juga memiliki hubungan atau kerjasama luar negeri. Guna mengawali langkah menuju kerjasama luar negeri, Pemerintah Provinsi Lampung dapat memulainya dengan melakukan pendataan tentang berbagai potensi daerah untuk selanjutnya menentukan sektor-sektor unggulan yang hendak dipromosikan dan disebarluaskan melalui berbagai media secara berkelanjutan. ●